SKRIPSI

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN TUJUAN ANGGARAN, DAN EVALUASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD Kota Pekanbaru)

Oleh:

MASWARDI
135310531

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SKRIPSI

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN TUJUAN ANGGARAN, DAN EVALUASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD Kota Pekanbaru)

Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau

Oleh:

MASWARDI
135310531

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Maswardi
NPM : 135310531
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Firdaus AR, SE., M.Si. Ak., CA.	Dina Hidayat, SE.M.Si., Ak., CA.

Mengetahui:

DEKAN	KETUA PRODI
Dr. Firdaus AR, M.Si., Ak., CA.	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN TUJUAN ANGGARAN, DAN EVALUASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA SKPD KOTA PEKANBARU)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain. Yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Pekanbaru, 05 Januari 2021
Yang Memberi Pernyataan,

Maswardi
135310531

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI
الجامعة الإسلامية الريوية
Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	: MASWARDI
NPM	: 135310531
Program Studi	: Akuntansi S1
Judul Skripsi	: PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN TUJUAN ANGGARAN, DAN EVALUASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 30 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam ***institution paper repository,*** Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Desember 2020
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor:1061/Kpts/FE-UIR/2016
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :1. Surat penetapan Ketua Jurusan/Program Studi Akuntansi tanggal 13 Oktober 2016 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang RI Nomor:14 Tahun 2005
3. Undang-Undang RI Nomor:12 Tahun 2012
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014
5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
   a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
   b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
   c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
   d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
   a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
   b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
7. Statuta Universitas Islam Riau Ttahun 2013
8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
   a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1.	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak, CA	Lektor Kepala, III/d	Pembimbing I
2	Dina Hidayat, SE., M.Si, Ak	Assisten Ahli /IIIa	Pembimbing II

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:

N a m a : Maswardi
N P M : 135310531
Jurusan/Jenjang Pendd : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat pemerinatah (Studi Empiris pada SKPD Kota Pekanbaru).

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas islam Riau.
4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatiakn usul dan saran dari forum seminar proposal
5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.

Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada Tanggal: 14 Oktober 2016
Dekan,

Drs. Abrar, M.Si, Ak, CA

Tembusan : Disampaikan pada:
1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Maswardi
NPM : 135310531
Judul Proposal : Pengaruh Partisipasi Anggara, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Pekanbaru).
Pembimbing : 1.Dr.Firdaus AR,SE.M.Si.Ak.CA
2.Dina Hidayat,SE.M.Si.Ak.CA
Hari/Tanggal Seminar : Rabu 09 Agustus 2017

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :
1.Judul : Disetujui dirubah/~~perlu diseminarkan~~ *)
2.Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3.Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4.Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5.Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6.Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7.Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8.Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9.Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10.Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11.Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12.Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13.Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14.Kesimpulan tim seminar : ~~Perlu~~/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dina Hidayat,SE.,M.Si.,Ak.,CA.		1.
2.	Dra.Eny Wahyuningsih,M.Si.,CA.		2.
3.	Drs.Abrar,M.Si.,Ak.,CA.		3.
4.	Siska,SE.,M.Si.,Ak.,CA.		4.
5.	Nina Nursida, SE.,M.Acc.		5.
6.	Dra.Eny Wahyuningsih,M.Si.,CA.		6.

Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan bidang akedemis

Dr.Firdaus AR,SE.M.Si.Ak.CA

Pekanbaru,09 Agustus 2017
Sekretaris,

Dra.Eny Wahyuningsih,M.Si.CA

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI
Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : **MASWARDI**

NPM 135310531

FAKULTAS : EKONOMI

JURUSAN : AKUNTANSI S1

JUDUL SKRIPSI : **PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN TUJUAN ANGGARAN, DAN EVALUASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU**

SPONSOR : **Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak. CA**

CO SPONSOR : **Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak**

Dengan Rincian Sebagai Berikut:

Tanggal	Catatan		Berita Acara	Paraf	
	Sponsor	Co Sponsor		Sponsor	Co Sponsor
10/12/2020	X		- ACC Skripsi		
10/12/2020	X		- Lanjut ke PB II		
12/12/2020		X	- Teknis keseluruhan - Perbaiki BAB V		
12/12/2020		X	- ACC Skripsi		
15/12/2020	X		- Teknis Penulisan - Perbaiki Rumusan Masalah - Tambahkan Desain		

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

			Penelitian		
22/12/2020	X		- Tambahan Hasil Penelitian dan Pembahasan - Perbaiki Simpulan		
23/12/2020	X		- Lanjut ke PB II		
29/12/2020		X	- Tambahan Kata Pengantar - Perbaiki Abstrak - Perbaiki Hasil Penelitian - Teknis Keseluruhan		
30/12/2020		X	- ACC Revisi Skripsi - Kembali ke PB I		
31/12/2020	X		- ACC Revisi Skripsi		

Pekanbaru, 31 Desember 2020

Wakil Dekan I

Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1745 / Kpts/FE-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi / oral komprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
   a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
   b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
   c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
   d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N a m a : Maswardi
N P M : 135310531
Program Studi : Akuntansi S1
Judul skripsi : Pengaruh Partisipasi Anggara, Kejelasan Tujuan Anggaran dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensive maahsiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, IV/a	Materi	Ketua
2	Dina Hidayat, SE., M.Si, Ak	Asisten Ahli, III/a	Sistematika	Sekretaris
3	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor, C/c	Methodologi	Anggota
4	Raja Ade Fitrasari, M. SE., M.Acc	Asisten Ahli, C/b	Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Dian Saputra, SE.,M.Acc.,Ak.CA	Assisten Ahli, C/b	-	Notulen
7				Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Desember 2020
Dekan

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :
1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Maswardi
NPM : 135310531
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
Hari/Tanggal : Selasa 15 Desember 2020
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA		
2	Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak. ,CA		
2	Raja Ade Fitrasari. M, SE., M.Acc		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai **65**)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan

Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan I

Pekanbaru, 15 Desember 2020
Ketua Prodi

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 1745/KPTS/FE-UIR/2020, Tanggal 14 Desember 2020, Maka pada Hari Selasa 15 Desember 2020 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensive/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi** S1 Tahun Akademis 2020/2021

1.N a m a	: Maswardi
2.N P M	: 135310531
3.Program Studi	: Akuntansi S1
4.Judul skripsi	: Pengaruh Partisipasi Anggara, Kejelasan Tujuan Anggaran dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
5.Tanggal ujian	: 15 Desember 2020
6.Waktu ujian	: 60 menit.
7.Tempat ujian	: Ruang sidang meja hijau Fekon UIR
8.Lulus Yudicium/Nilai	: ***Lulus (B-) 64,62***
9.Keterangan lain	: Aman dan lancar.

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si	**Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**
Wakil Dekan Bidang Akademis	Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA (……)
2. Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA (……)
3. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA (……)
4. Raja Ade Fitrasari. M, SE., M.Acc (……)

Notulen

1. Dian Saputra, SE., M.Acc., Ak., CA., ACPA (……)

Pekanbaru, 15 Desember 2020
Mengetahui
Dekan,

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh…

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah Subhana Wa Ta'ala, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul **: "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru",** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung selesainya skripsi ini, yakni :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Firdaus AR, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang juga merupakan dosen pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu, membantu, mengarahkan dan memberi petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dina Hidayat, S.E, M.Si, Ak selaku penasehat akademis penulis dan juga merupakan pembimbing II yang telah mendidik, membimbing, dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen selaku staff pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah membemberikan bekal ilmu pengetahuan.
5. Seluruh Staff dan Karyawan/I Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti masa perkuliahan.
6. Teristimewa dan terima kasih ku persembahkan Skripsiku ini buat orangtuaku tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan bimbingan, semangat, dan bantuan, baik moril maupun materil, yang begitu besar kepada penulis. Terima kasih buat kesabaran, kasih sayang, perhatian, dan do'a yang telah diberikan selama ini. Kata

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ucapan terima kasih ini kupersembahkan untuk orangtua ku, tapi itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan segala pengorbanan dalam membesarkan dan mendidik anak-anakmu untuk menjadi manusia yang berbakti dan berguna.

7. Buat kakak-kakakku tersayang, terima kasih buat kasih sayang, dukungan, perhatian, dan semangat yang telah diberikan selama ini baik saat senang maupun sedih. Terima kasih buat semua keluarga besarku yang tidak bias disebutkan satu persatu.
8. Sahabat-sahabat ku yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Teman-teman satu angkatan 2013 Kelas A semoga ilmu yang selama ini kita tempuh di UIR dapat kita gunakan dengan baik, dan sukses selalu buat kita semua.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah mereka berikan untuk penulis akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhana Wa Ta'ala dalam bentuk yang jauh lebih baik dari yang mereka berikan kepada penulis. Amiiiiin. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh….

Penulis

MASWARDI
NPM 135310531

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kota Pekanbaru.

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Pemerintah Daerah yang ada di SKPD Kota Pekanbaru yang berjumlah 43 SKPD, yaitu kepala sub bagian keuangan, bendahara, dan staff bagian akuntansi yang ada disetiap SKPD. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 31 SKPD. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sehingga responden dalam penelitian ini sebanyak 93 responden. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan *software* SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, dan kejelasan tujuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kota Pekanbaru, sedangkan evaluasi anggaran tidak signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kota Pekanbaru. Namun demikian hasil penelitian ini juga menggambarkan bahwa secara simultan partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, kinerja aparat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the effect of budget participation, budget goal clarity and budget evaluation againts the performance of local government apparatus in Pekanbaru City.

The population in this research is local government apparatus in Pekanbaru City SKPD, totally 43 SKPD, which include head of financial division, treasurer, and accounting staff in each SKPD. While the sample in this research were as many as 31 SKPD. The sampling technique using purposive sampling method. So the respondent in this research were 93 respondents. This research uses multiple linear regression analysis model with SPSS software.

The results show that budget participation and budget goal clarity have a significant effect on the performance of local government apparatus in Pekanbaru City, while budget evaluation is not significant for the performance of local government apparatus in Pekanbaru City. However, the result also reveal that simultaneously budget participation, budget goal clarity and budget evaluation have a significant effect on the performance of local government apparatus in Pekanbaru City.

Keywords: *Budget participation, budget goal clarity, budget evaluation, performance apparatus*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **v**
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI **vi**
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL ..... **vii**
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI ..... **viii**
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI ..... **ix**
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN ..... **x**
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xx**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.5 Sistematika Penulisan 8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS **10**
2.1 Telaah Pustaka 10
2.1.1 Definisi dan Karakteristik Anggaran Sektor Publik 10
2.1.2 Peran dan fungsi APBD 11
2.1.3 Mekanisme Penyusunan APBD 13
2.1.4 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 14
2.1.5 Partisipasi Anggaran 15
2.1.6 Kejelasan Tujuan Anggaran 17
2.1.7 Evaluasi Anggaran 17
2.1.8 Kinerja Pemerintah Daerah 18
2.1.9 Hubungan Antar Variabel 19
2.1.10 Penelitian Terdahulu 22
2.1.11 Model Penelitian 24
2.2 Hipotesis 24

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III METODE PENELITIAN 26
3.1 Desain Penelitian 26
3.2 Objek Penelitian 27
3.3 Definisi Variabel Penelitian 26
3.4 Populasi dan Sampel 29
3.5 Jenis dan Sumber Data 31
3.6 Teknik Pengumpulan Data 33
3.7 Teknik Analisis Data 33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....39
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 39
4.2 Hasil Penelitian 61
4.3 Pembahasan 73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 80
5.1 Simpulan 80
5.2 Saran 80
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 22
Tabel 3.1 Daftar Populasi SKPD Kota Pekanbaru 30
Tabel 3.2 Daftar Sampel SKPD Kota Pekanbaru 32
Tabel 4.1 Jumlah Responden dan Tingkat Pengembalian 60
Tabel 4.2 Karakteristik Responden 61
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Penelitian 63
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Data 64
Tabel 4.5 Hasil Uji Reabilitas Data 65
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas 66
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi 68
Tabel 4.8 Variabel Entered/ Removed 68
Tabel 4.9 Koefisien Regresi Linier Berganda 69
Tabel 4.10 Nilai Koefisien Determinasi 71
Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan (Uji-F) 72
Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t) 72

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian 24
Gambar 4.1 Uji Normalitas 66
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas 67

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner
Lampiran 2: Tabulasi Data Kuesioner
Lampiran 3: Uji Validitas
Lampiran 4: Uji Reabilitas
Lampiran 5: Regresi Linear Berganda

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009 : 61). Anggaran juga merupakan instrument kebijakan fiskal pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan perpajakan. Dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Serta, sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik.

Kinerja Pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu (Abdul Rohman, 2009). Kinerja aparat pemerintahan dinilai dari bagaimana anggota-anggota dalam sektor pemerintahan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di organisasinya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Menurut Mardiasmo (2009), kinerja suatu unit kerja pemerintah daerah dapat diukur melalui pencapaian aktivitas-aktivitas yang dibiayai oleh APBD.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran, maka setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Permendagri No 64 Tahun 2013.

Menurut Don R. Hansen dan Maryanne M. Mowen (2000) Partisipasi Anggaran adalah tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu dalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan. Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya, bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka.

Menurut Kenis dalam Kalsum (2015) Kejelasan Tujuan Anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Kenis dalam Kalsum (2015) juga menyatakan bahwa, Evaluasi Anggaran merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja departemen.

Agar menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif maka APBD yang pada hakekatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Kenis dalam Kalsum (2015) berpendapat bahwa pelaksanaan anggaran dapat berjalan efektif apabila penyusunan anggaran dan penerapannya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memperhatikan lima komponen dari karakteristik tujuan anggaran, yaitu: partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik, evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran APBD 2016. Pedoman penyusunan anggaran meliputi: Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal-hal khusus lainnya. Karena saat ini pemerintah menggunakan penganggaran berbasis pendekatan kinerja, maka reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran.

Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar sebagai berikut: Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, dan penyusunan rancangan perda APBD, serta penetapan APBD. Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Penelitian Istiyani (2009), menguji tentang Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Temaggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima variabel karakteristik tujuan anggaran, empat variabel (kejelasan tujuan, partisipasi,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

umpan balik dan kesulitan pencapaian tujuan) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat pemda Kabupaten Temanggung. Sedangkan variabel Evaluasi Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemda di Kabupaten Temanggung.

Penelitian Nina (2014), menguji tentang Karakteristik Tujuan Anggaran dan Keadilan Prosedural terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan Tujuan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Partisipasi Anggaran dan Evaluasi Anggaran berpengaruh Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian Wardani (2015), menguji tentang Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Tujuan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pemda Banjarnegara, sedangkan Evaluasi anggaran, Umpan Balik dan Kesulitan Tujuan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pemda Banjarnegara.

Penelitian Kalsum (2015), menguji tentang Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran dan evaluasi anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten Bengkalis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penelitian ini merupakan replikasi dari Kalsum (2015), karena ketidak konsistenan hasil penelitian tersebut maka peneliti tertarik untuk menguji kembali dengan objek yang berbeda dimana penelitian ini dilakukan pada SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru. Alasan memilih Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai objek penelitian ini karena dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja aparat pemerintah, Kota Pekanbaru mendapatkan kriteria C dikarenakan masih perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar. Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sepanjang tahun 2016, bahwasanya ada 12 kota/kabupaten di Provinsi Riau yang mendapatkan kriteria B (baik), CC (cukup baik), C (agak kurang), dan D (kurang), sedangkan yang mendapatkan kriteria A (memuaskan) tidak ada. Dari sekian banyak hanya Kabupaten Siak yang mendapatkan kriteria B (sumber: www.riau.go.id).

Fitra Riau menilai Pemko Pekanbaru tidak transparan dalam pengelolaan keuangan daerah. Banyak persoalan keuangan yang tidak diekspos ke publik, bahkan ada penggunaan anggaran yang tidak semestinya masuk dalam pengeluaran mengingat berkurangnya pendapatan. Fitra Riau mencatat sampai semester I tahun 2016, terdapat beberapa persoalan yang menunjukkan buruknya kinerja pemerintah kota pekanbaru. Pertama, terkait dengan persoalan sampah yang tidak kunjung tuntas. Kedua terkait dengan terancam mandegnya pembangunan fasilitas sarana dasar publik, dengan dalih minimnya anggaran bahkan Pemko Pekanbaru mengakui pertengahan tahun ini terjadi kekosongan kas daerah (sumber :www.goriau.com).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tahun 2016, proyeksi pendapatan daerah Kota Kekanbaru, masih diperkirakan sebesar Rp 2,7 triliun dan belanja daerah diproyeksi mencapai sebesar Rp 3,04 triliun. Sedangkan besaran APBD 2016 yang disetujui Rp 3,1 triliun pada sidang Paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). APBD yang telah disahkan oleh DPRD Kota Pekanbaru menuai masalah, salah satu penyebabnya adalah berkurangnya anggaran dana bagi hasil (DBH) dari pusat, dana alokasi khusus (DAK), dan tidak tercapainya pendapatan asli daerah (PAD). Akibatnya, Pemko Pekanbaru mengalami defisit anggaran lebih kurang Rp 1 triliun (sumber : www.riaupos.co).

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengajukan penelitian dengan judul: "**Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah". (Studi Empiris pada SKPD Kota Pekanbaru).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis mengidentifikasi yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru?
b. Apakah kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru?
c. Apakah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

a. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru.
b. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kejelasan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru.
c. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pemerintah daerah, akademisi dan penelitian selanjutnya. Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti**,** penelitian ini tidak hanya bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, tetapi juga menambah pengetahuan serta memahami tentang pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
b. Bagi Dunia Akademik, penelitian ini dapat dijadikan sumber pembelajaran dan referensi bagi dunia akademik mengenai pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Bagi Pemerintah, memberikan masukan-masukan untuk meningkatkan kualitas pengembangan sistem pengukuran kinerja dengan tingkat pengembangan sistem pengukuran kinerja yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah untuk mencapai anggaran yang diinginkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing-masing BAB dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab yang menjadi pengantar dan menjelaskan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian ini dilakukan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan secara teoritis mengenai teori-teori yang menjadi sumber terbentuknya suatu hipotesis, juga acuan untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode-metode dan variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang Kota Pekanbaru yang menjadi objek penelitian. Serta sikap dan objek yang diteliti, juga pengolahan data yang didapat, dan pembahasan yang menjelaskan data tersebut.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang diambil dan saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Definisi dan Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Dalam bentuk yang paling sederhana menurut Mardiasmo (2009 : 62), anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran sektor publik menyajikan suatu bagian yang penting dari sistem motivasi organisasi yang dirancang untuk memperbaiki perilaku dan kinerja aparat pemerintah.

Anggaran merupakan suatu alat penilaian kinerja yang merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Dengan melakukan penilaian kinerja terhadap individu aparat, maka akan dapat diketahui tingkat kontribusi seorang pegawai terhadap unit kerja. Serta, anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Mardiasmo, 2009 : 63)

Menurut Bastian (2006 : 15), anggaran sektor publik mempunyai karakteristik sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(1) anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan, (2) anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, (3) anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, (4) usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran dan (5) sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.2 Peran dan fungsi APBD

Tahapan penganggaran organisasi Pemerintah Daerah merupakan tahapan yang mempunyai arti dan peran penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian. Arti penting APBD dapat dilihat dari aspek-aspek berikut: (1) anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (2) anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumberdaya dan pilihan yang tersedia terbatas (Istiyani, 2009 : 24).

Menurut Mardiasmo (2009 : 63), anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:

a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatas sumberdaya *(scarcity of resources)*, pilihan, dan *trade offs*.
c. Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Mardiasmo (2009 : 63) juga menyatakan bahwa, anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. *Sebagai alat perencanaan,* yang antara lain digunakan untuk: (1) merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, (2) merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan institusi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya, (3) mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan serta (4) menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
b. *Sebagai alat pengendalian*, yang antara lain digunakan untuk: (1) mengendalikan efisiensi pengeluaran, (2) membatasai kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah, (3) mencegah *overspending, underspending*, dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang yang bukan prioritas, serta (4) memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.
c. *Sebagai alat kebijakan fiskal,* yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi daerah dan mendorong ekonomi daerah melalui pemberian fasilitas, dorongan, dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
d. *Sebagai alat politik*, yang digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan. Anggaran sebagai dokumen politik merupakan bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menurunkan kredibilitas atau bahkan menjatuhkan kepemimpinan eksekutif.
e. *Sebagai alat komunikasi dan koordinasi* antar unit kerja dalam organisasi Pemerintah Daerah yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran yang disusun dengan baik akan dapat mendeteksi adanya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan anggaran.
f. *Sebagai alat penilaian kinerja*. Anggaran pada dasarnya merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah kepada pemberi wewenang (masyarakat) untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Kinerja setiap pelaksanaan dapat diukur dan dievaluasi secara periodik maupun insidentil, yaitu apakah: (1) telah sesuai dengan rencana kegiatan anggaran, (2) tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan, (3) telah dilaksanakan secara efisien dan efektif berdasarkan pembading yang sejenis.
g. *Sebagai alat untuk memotivasi*. Pemerintah daerah agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja. Agar dapat memotivasi pegawai, target anggaran hendaknya memberikan tantangan tertentu namun tetap ditetapkan dalam batas rasional yang dapat dicapai.
h. *Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik*. Artinya, proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat, melalui proses penjaringan aspirasi yang hasilnya digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan umum anggaran. Jika tidak ada media untuk menyampaikan aspirasi, masyarakat dapat melakukan berbagai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tindakan yang tidak diinginkan, seperti aksi boikot, *vandalisme*, dan sebagainya.

2.1.3 Mekanisme Penyusunan APBD

Dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2016 masih tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran (*output*) dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini, setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang dipresentasikan kedalam tolak ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2016, dalam menyusun APBD tahun anggaran 2016 ditekankan pada penyusunan anggaran yang terpadu *(unifilied budget)* dimana dalam menyusun rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintah yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Penyusunan APBD secara terpadu, harus tetap sejalan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Dalam siklus penganggaran ditetapkan prinsip-prinsip pokok sebagai berikut (Mardiasmo, 2009 : 72) :

a. Tahap persiapan anggaran.
   Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Artinya perlu diperhatikan sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

b. Tahap ratifikasi anggaran.
   Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Selain *managerial skill*, pimpinan eksekutif harus mempunyai keahlian dalam hal *political skill*, *salesman ship* dan *coalition building skill*. Selain keahlian di atas, pimpinan eksekutif harus mempunyai integritas dan kesiapan mental yang tinggi. Hal ini menjadi penting karena pada tahap ini dibutuhkan pimpinan eksekutif yang mampu menjawab dan memberikan argumen yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan dari pihak legislatif.
c. Tahap pelaksanaan anggaran
   Tahap ini yang paling penting adalah harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik, bagaimana sistem informasi keuangan termasuk sistem akuntasi dan sistem pengendalian manajemen.
d. Tahap pelaporan dan evaluasi
   Tahap ini sangat terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi/pelaksanaan anggaran didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka tahap ini diharapkan tidak banyak masalah.

2.1.4 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Penyusunan anggaran berdasarkan kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja, indikator kinerja, analisa standar belanja, standar satuan harga pelayanan minimal. Pendekatan ini lebih mengutamakan upaya pencapaian keluaran dari masukan yang ditetapkan.

Suatu rencana kinerja memuat berbagai komponen sebagai berikut (Istiyani, 2009 : 36):

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Tujuan dan sasaran, sebagaimana termuat dalam dokumen rencana strategis (renstra) SKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya
b. Program, sebagaimana termuat dalam dokumen renstra SKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.
c. Kegiatan, yaitu tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh SKPD sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
d. Indikator kinerja kegiatan, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

2.1.5 Partisipasi Anggaran

Menurut Brownel dalam coryanata (2004 : 619), partisipasi adalah suatu perilaku, pekerjaan, dan aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintah selama aktivitas penyusunan anggaran berlangsung. Partisipasi penyusunan anggaran diperlukan dikarenakan agar anggaran yang dibuat sesuai dengan realita atau kenyataan yang ada. Partisipasi anggaran menunjukkan pada luasnya bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka (Munawar, 2006).

Menurut Nordiawan (2006) Anggaran adalah:

> Sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Disinilah fungsi dan peran penting anggaran.

Menurut Mulyadi (2001) Partisipasi dalam penyusunan merupakan:

> Keikutsertaan individual panitia anggaran dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan dimasa yang akan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

datang. Dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran maka akan terjadi pertukaran informasi yang tentunya dapat meningkatkan kinerja.

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Argyris dalam Nor (2007), menyatakan bahwa partisipasi sebagai alat untuk mencapai tujuan, partisipasi juga sebagai alat untuk mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi. Sehingga partisipasi dapat diartikan sebagai berbagi pengaruh, pendelegasian prosedur-prosedur, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan suatu pemberdayaan. Partisipasi yang baik membawa beberapa keuntungan sebagai berikut: (1) memberi pengaruh yang sehat terhadap adanya inisiatif, moralisme dan antusiasme, (2) memberikan suatu hasil yang lebih baik dari sebuah rencana karena adanya kombinasi pengetahuan dari beberapa individu, (3) dapat meningkatkan kerja sama antar departemen, dan (4) para karyawan dapat lebih menyadari situasi di masa yang akan datang yang berkaitan dengan sasaran dan pertimbangan (Argyris, dalam Nor 2007).

Dengan adanya Partisipasi Anggaran diharapkan kinerja para aparatur pemerintah dapat meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka para pimpinan organisasi pemerintahan akan bersungguh-sungguh dalam tujuan atau standar yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunanya (Milani, dalam Darlis 2002).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.1.6 Kejelasan Tujuan Anggaran

Menurut Munawar (2006) dalam Nina (2014), kejelasan tujuan anggaran akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari aparat pemerintah daerah bahkan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran dan dengan didorong oleh komitmen yang tinggi, akan menimbulkan kinerja aparat pemerintah daerah.

Syafrial (2009) dalam Yulianis (2014), menguraikan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif dari pada tidak menetapkan tujuan spesifik. Hal ini akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja.

2.1.7 Evaluasi Anggaran

Menurut Kenis dalam Kalsum (2015) Evaluasi Anggaran adalah tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja departemen. Brownell et.al dalam Kalsum (2015) juga menyatakan bahwa, evaluasi yang bersifat *punitive* dapat menyebabkan rendahnya motivasi, sebaliknya evaluasi yang bersifat *supportive* dapat menghasilkan sikap dan tingkah laku positif.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi anggaran merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja. Dimana apabila evaluasi yang dilakukan bersifat *punitive* maka motivasi menjadi rendah, dan sebaliknya jika

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

evaluasi yang dilakukan bersifat *supportive* akan menghasilkan tingkah laku yang positif (Salbiah Rizky, 2012)

Munawar (2006) dalam Latif (2014), menjelaskan bahwa evaluasi secara mendasar mempunyai empat tujuan yaitu: 1) meyakinkan bahwa kinerja yang sesungguhnya sesuai dengan kinerja yang diharapkan, 2) memudahkan untuk membandingkan antara kinerja individu satu dengan yang lainnya, 3) sistem evaluasi kinerja dapat memicu suatu isyarat tanda bahasa, memberi sinyal mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi, dan 4) untuk menilai pembuatan keputusan manajemen.

2.1.8 Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam pengurusan pengskemaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Indra Bastian, 2006).

Prawirosentono (2002), menyebutkan kinerja atau *performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Terdapat hubungan erat antara kinerja perorangan dengan kinerja organisasi, dengan kata lain, bila kinerja karyawan baik maka kemungkinan kinerja organisasi juga baik.

Menurut Anwar dalam Kalsum (2015), kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mardiasmo (2009 : 121) menyatakan bahwa, sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk menilai suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Anwar dalam Kalsum (2015) juga menyatakan bahwa, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu:

a. Faktor kemampuan (*ability*)
   Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan reality (*knowledge + skill*) artinya pegawai yang memiliki IQdiatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

b. Faktor motivasi (*motivation*)
   Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja) yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu .

2.1.9 Hubungan Antar Variabel

a. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja

Partisipasi anggaran dinilai dapat mengurangi kesenjangan anggaran apabila bawahan membantu memberikan informasi pribadi tentang prospek masa depan sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih akurat, meskipun tidak menutup dari para pimpinan akan dapat meningkatkan kesenjangan anggaran (Abdul Latif, 2014). Kegiatan usulan SKPD perlu diasosiasikan oleh seluruh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pegawai dengan memahami kebutuhan masyarakat dalam pengelolaanya, sehingga kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Pegawai untuk meningkatkan kinerjanya dituntut untuk mengembangkan program yang sesuai dengan target dan sasaran program yang dihasilkan. Hal ini untuk dapat memberikan tingkat partisipasi anggaran yang menunjang terwujudnya kinerja aparat pemerintah.

Uraian diatas didukung oleh teori Munawar (2006) dalam menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja para aparat akan meningkat. Hal ini didasarkan bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang partisipatif disetujui, maka aparat akan menginternalisasikan tujuan dan standar yang ditetapkan dan aparat juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya.

b. Pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja

Untuk dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif maka APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan rill di masyarakat untuk satu tahun tertentu (Abdul Latif, 2014)

Teori yang mendukung dinyatakan oleh Kenis dalam Kalsum (2015), bahwa manajer member reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan tujuan anggaran.Aparat dapat meningkatkan kepuasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kerja, ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran dan efisiensi biaya aparat secara signifikan.

c. Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja

Evaluasi anggaran menunjuk pada luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan dan digunakan dalam evaluasi kinerja aparat. Kegiatan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat terkelola dengan baik perlu ada suatu program nyata yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan SKPD untuk dapat diperbaiki dengan menggunakan indikator pengukuran evaluasi yang tepat dan akurat dalam menilai suatu kegiatan penganggaran yang mempengaruhi kinerja aparat.

Hasil evaluasi mengenai anggaran juga perlu ditinjau berdasarkan penanganan masalah berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Selama ini evaluasi atas penggunaan anggaran sangat berdampak positif untuk mempengaruhi hasil kegiatan penganggaran yang teralokasikan sesuai dengan besarnya pemberian anggaran dan penilaian tentang hasil bagi dari kegiatan pengelolaan.

Mengevaluasi dari setiap kegiatan penganggaran mempunyai efek positif terhadap kemampuan aparat dalam menilai, memanfaatkan dan mengelola anggaran yang diterapkan secara terencana, terarah dan tersusun sesuai dengan kinerja aparat dalam pengelolaan yang tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga anggaran tidak ada yang terlambat cair dan mudah dimanfaatkan dan digunakan untuk kegiatan pembangunan. Apabila evaluasi dilakukan secara terencana dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengawasan yang terukur, akan berdampak terhadap kinerja aparat dalam pengelolaan anggaran.

Pembahasan diatas mendukung teori Menurut Munawar (2006) menjelaskan:

> bahwa evaluasi secara mendasar mempunyai empat tujuan yaitu : 1) meyakinkan bahwa kinerja yang sesungguhnya sesuai dengan kinerja yang diharapkan, 2) memudahkan untuk membandingkan antara kinerja individu satu dengan yang lainnya, 3) sistem evaluasi kinerja dapat memicu suatu isyarat tanda bahasa, member sinyal mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi, dan 4) untuk menilai pembuatan keputusan manajemen.

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Tinjauan atas penelitian terdahulu berupa nama peneliti, tahun penelitian, variabel yang dipergunakan serta hasil penelitiannya dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Tinjauan atas Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti / tahun	Topik Penelitian	Variabel Yang Dipergunakan	Hasil Penelitian
1.	Istiyani (2009)	Pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.	Variabel independen adalah karakteristik tujuan anggaran dan variabel dependen kinerja aparat pemerintah daerah.	Partisipasi anggaran, kejelasan anggaran, umpan balik,tingkat kesulitan pencapaian tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, sedangkan evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

				pemerintah daerah.
2.	Gian Nina (2014)	Pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan keadilan procedural terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.	Variabel independen adalah karakteristik tujuan anggaran, keadilan procedural dan variabel dependen kinerja aparat pemerintah daerah.	Partisipasi anggaran dan evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah, sedangkan kejelasan tujuan anggaran, umpan balik, kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
3.	Alfian Sapta Wardani (2015)	Pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.	Variabel independen adalah karakteristik tujuan anggaran, dan variabel dependen kinerja aparat pemerintah daerah.	Partisipasi anggaran dan kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, sedangkan evaluasi anggaran, umpan balik dan kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
4.	Astari Kalsum (2015)	Pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan tujuan	Variabel independen adalah partisipasi anggaran, kejelasan tujuan	Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran,dan evaluasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.	anggaran, evaluasi anggaran dan variabel dependen kinerja aparat pemerintah daerah	anggaran berpengaruh pada kinerja aparat pemerintah daerah.

2.1.11 Model Penelitian

Hubungan antara partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah pada penelitian ini digambarkan dalam model dibawah ini :

Gambar 2.1
Model Penelitian

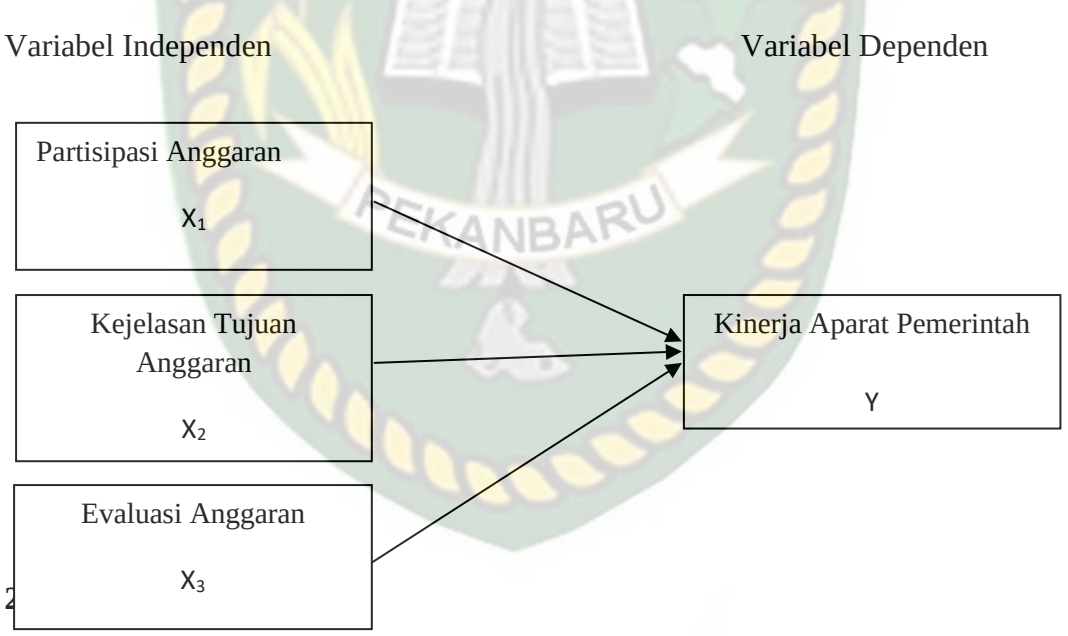

Berdasarkan teori dan latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H1 : Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

H2 : Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

H3 : Evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

H4 : Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Cresweel (2010 : 24), pendekatan kuantitatif adalah pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah, berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survey untuk menentukan frekuensi dan presentase tanggapan mereka.

Peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif akan menguji suatu teori dengan cara merinci suatu hipotesis-hipotesis yang spesifik, lalu mengumpulkan data untuk mendukung atau membantah hipotesis-hipotesis tersebut. Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kuantitatif berdasarkan informasi statistika. Pendekatan penelitian yang dalam menjawab permasalahan penelitian memerlukan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel dari objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terlepas dari konteks waktu, tempat dan situasi.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang dilakukan peniliti adalah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Masalah yang diteliti adalah "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru".

3.3 Definisi Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu Variabel Dependen (Y) dan Variabel independen (X) seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

3.3.1 Variabel Dependen (Y)

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi (Abdul Rohman, 2009). Kinerja aparat pemerintah daerah dalam penganggaran dinilai baik jika anggaran yang ditetapkan dapat dicapai dan dikendalikan. Istrumen pengukuran variabel kinerja ini diadopsi dari kuisioner penelitian Istiyani (2009) dengan indikatornya: 1) Perencanaan, 2) Evaluasi, 3) Investigasi, 4) Pengkoordinasian, 5) Negosiasi, 6) Pengawasan, dan 7) Kinerja secara keseluruhan. Pengukuran variabel ini dengan menggunakan 5 (lima) poin skala Likert dimana poin 1 menunjukan sangat setuju (SS), poin 2 menunjukkan setuju (S), poin 3 menunjukan ragu-ragu (RR), poin 4 menunjukan tidak setuju (TTS), dan poin 5 menunjukan sangat tidak setuju (STS).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3.3.2 Variabel Independen (X)

Variabel bebas *(independent variable)* adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat *(dependent variable)* dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah :

a. Partisipasi Anggaran (X_1)

Variabel ini mengungkapkan tingkat pengaruh dan keterlibatan yang dirasakan oleh individu dalam proses perencanaan anggaran serta luasnya partisipasi pemerintah daerah (Istiyani, 2009). Instrumen variabel ini merupakan replikasi dari kuisioner penelitian Astari (2015) dengan indikatornya: 1) Keterlibatan dalam penyusunan anggaran, 2) Kebutuhan memberikan pendapat, 3) Sejauh mana keterlibatan dalam penyusunan anggaran, 4) Sejauh mana keterlibatan dalam memutuskan anggaran, dan 5) Sejauh mana tanggung jawab dalam menentukan jumlah anggaran. Pengukuran variabel ini dengan menggunakan 5 (lima) poin skala Likert dimana poin 1 menunjukan sangat setuju (SS), poin 2 menunjukkan setuju (S), poin 3 menunjukan ragu-ragu (RR), poin 4 menunjukan tidak setuju (TTS), dan poin 5 menunjukan sangat tidak setuju (STS).

b. Kejelasan Tujuan Anggaran (X_2)

Variabel ini menunjukkan sejauh mana tujuan anggaran program dan kegiatan SKPD dinyatakan secara spesifik, jelas dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab terhadap anggaran (Istiyani, 2009). Instrument variabel ini merupakan replikasi dari kuisioner penelitian Astari (2015) dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

indikatornya: 1) Mengetahui dengan jelas dan tepat tujuan anggaran, 2) Mengetahui dengan jelas prioritas dari anggaran, dan 3) Perkiraan ketidakjelasan tujuan anggaran dalam bidangnya.

Pengukuran variabel ini dengan menggunakan 5 (lima) poin skala Likert dimana poin 1 menunjukan sangat setuju (SS), poin 2 menunjukkan setuju (S), poin 3 menunjukan ragu-ragu (RR), poin 4 menunjukan tidak setuju (TTS), dan poin 5 menunjukan sangat tidak setuju (STS).

c. Evaluasi Anggaran (X_3)

Variabel ini mengungkapkan sejauh mana selisih anggaran program dan kegiatan SKPD ditelusuri oleh pimpinan ke masing-masing bawahan dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja bawahan dalam penyusunan dan penggunaan anggaran (Istiyani, 2009). Instrument variabel ini merupakan replikasi dari kuisioner penelitian Astari (2015) dengan indikatornya: 1) Penyerapan anggaran, 2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi, 3) Respon atasan terhadap penyimpangan anggaran yang besar, 4) Fungsi anggaran sebagai pengawasan, dan 5) Efisiensi. Pengukuran variabel ini dengan menggunakan 5 (lima) poin skala Likert dimana poin 1 menunjukan sangat setuju (SS), poin 2 menunjukkan setuju (S), poin 3 menunjukan ragu-ragu (RR), poin 4 menunjukan tidak setuju (TTS), dan poin 5 menunjukan sangat tidak setuju (STS).

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kota Pekanbaru. Adapun jumlah keseluruhan populasi adalah sebanyak 43 SKPD.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rincian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru yang menjadi populasi dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1 :

Tabel 3.1
Daftar Populasi SKPD Kota Pekanbaru

NO.	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat
4.	Badan Pendapatan Daerah
5.	Badan Perpustakaan dan Kearsipan
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
7.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
8.	Badan Penelitian dan Pengembangan
9.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11.	Dinas Pendidikan
12.	Dinas Kesehatan
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
15.	Dinas Sosial
16.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
17.	Dinas Tenaga Kerja
18.	Dinas Ketahanan Pangan
19.	Dinas Pertanahan
20.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
21.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23.	Dinas Perhubungan
24.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
25.	Dinas Koperasi dan UMKM
26.	Dinas Pertanian dan Perikanan
27.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
28.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
29.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
30.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
31.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32.	Satuan Polisi Pamong Praja
33.	Kecamatan Pekanbaru Kota
34.	Kecamatan Rumbai
35.	Kecamatan Payung Sekaki
36.	Kecamatan Sukajadi
37.	Kecamatan Rumbai Pesisir

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

38.	Kecamatan Senapelan
39.	Kecamatan Tampan
40.	Kecamatan Sail
41.	Kecamatan Tenayan Raya
42.	Kecamatan Marpoyan Damai
43.	Kecamatan Lima Puluh

Sumber :*www.pekanbaru.go.id*

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 31 SKPD. Alasan diambilnya sampel sebanyak 31 SKPD adalah disebabkan sebagian objek yang tersebar diwilayah yang cukup luas, serta kerterbatasan dana, tenaga dan waktu. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dimana yang dijadikan sampelnya terdiri dari Sektretariat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor yang ada di Kota Pekanbaru. Setiap sampel masing-masing memiliki 3 responden yaitu; Kepala sub bagian keuangan, Bendahara, dan Staff bagian akuntansi pada SKPD. Adapun alasan pemilihan respoden adalah karena kepala sub bagian, bendahara dan staf bagian akuntansi bertanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan pada masing-masing SKPD, dan setiap bagian tersebut merupakan elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah, serta terlibat langsung dan sangat memahami kegiatan akuntansi.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik sekelompok orang atau seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Rincian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru yang menjadi sampel dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.2 :

Tabel 3.2
Daftar Sampel SKPD Kota Pekanbaru

NO.	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru	Responden
1.	Sekretariat Daerah	3
2.	Sekretariat DPRD	3
3.	Inspektorat	3
4.	Badan Pendapatan Daerah	3
5.	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	3
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3
7.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	3
8.	Badan Penelitian dan Pengembangan	3
9.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3
11.	Dinas Pendidikan	3
12.	Dinas Kesehatan	3
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
14.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3
15.	Dinas Sosial	3
16.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3
17.	Dinas Tenaga Kerja	3
18.	Dinas Ketahanan Pangan	3
19.	Dinas Pertanahan	3
20.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3
21.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3
22.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3
23.	Dinas Perhubungan	3
24.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	3
25.	Dinas Koperasi dan UMKM	3
26.	Dinas Pertanian dan Perikanan	3
27.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3
28.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3
29.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	3
30.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3
31.	Satuan Polisi Pamong Praja	3
	Total	**93**

Sumber :*www.pekanbaru.go.id*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan teknik kuesioner yaitu dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, dan kuesioner tersebut akan diantar langsung ke responden dengan dipandu oleh peneliti dengan menjelaskan item-item pertanyaan kepada responden pada saat pengisian kuesioner tersebut dilakukan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert*. Menurut Imam Ghozali (2007), Skala *Likert* adalah skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut :

1 = Sangat tidak setuju
2 = Tidak setuju
3 = Ragu-ragu
4 = Setuju
5 = Sangat setuju

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Tujuan dari analisis data adalah mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung didalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

suatu masalah. Penganalisaan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS versi 17.

3.7.1 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas menguji seberapa baik suatu instrumen yang dibuat, mengukur konsep tertentu yang ingin diukur (Sekaran, 2011:39).

Kriteria pengambilan keputusan :

1. Jika nilai sig. (2-*tailed*) < 0,05 dan *Pearson Correlation* bernilai positif, maka istrumen tersebut dinyatakan valid;
2. Jika nilai sig. (2-*tailed*) < 0,05 dan *Pearson Correlation* bernilai negatif, maka istrumen tersebut dinyatakan tidak valid;
3. Jika nilai sig. (2-*tailed*) > 0,05, maka istrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Dalam penelitian ini menguji validitas diukur dengan cara menggunakan analisis metode koefisien korelasi. Jika korelasi masing-masing indikator variabel signifikan, maka dikatakan valid. Dalam hal ini signifkan dalam level 0,01 (2-*tailed*).

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas adalah berkaitan dengan masalah adanya kepercayaan tentang instrumen. Suatu instrumen dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (konsisten) jika hasil dari pengujian instrumen tersebut menunjukan hasil yang tetap.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Reliability atau keandalan menguji seberapa konsisten suatu instrumen pengukuran mengukur apa pun konsep yang diukurnya (Sekaran, 2011:39). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* >0,6. Semakin dekat *Cronbach's Alpha* dengan 1, semakin tinggi keandalan konsistensi internal (Sekaran, 2011:177).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai kontribusi atau tidak (Ghozali, 2013:160). Dengan menggunakan *Normal P-P Plot Regression Standardized Residual.* Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, begitu pula sebaliknya.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Apabila nilai tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2013:106).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Gejala dideteksi menggunakan grafik *scatterplot*. Jika ada pola

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada period ke t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, berarti terdapat autokorelasi (Ghozali, 2013:110). Autokorelasi dideteksi dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (*DW test*), jika DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

3.7.3 Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Sebagai variabel dependen adalah kinerja aparat pemerintah daerah, variabel independennya partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran.

Adapun bentuk persamaan regresi berganda dalam penelitian ini :

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$

Keterangan :

Y = Kinerja Aparat Pemerintah Derah

a = Konstanta

$b_{1,2}$ = Koefisien regresi dari variabel independen

X_1 = Partisipasi Anggaran

X_2 = Kejelasan Tujuan Anggaran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

X_3 = Evaluasi Anggaran

e = Standar eror

b. Uji Koefisien Determinan (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai R2 mendekati 1, maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:169).

c. Uji simultan (F)

Uji F digunakan untuk menunjukan apakah semua variabel independen secara bersamaan (simultan) mempengaruhi terhadap variabel independen. Keputusan diambil dengan cara membandingkan antara nilai signifikan F dengan *level of significant* pada tingkat signifikansi (α) 0,05 atau 5%.

Dengan pengujian sebagai berikut :

1. Jika sig <α (5% atau 0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan kata lain variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika sig >α (5% atau 0,05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan kata lain variabel independen tidak secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

d. Uji Parsial (T)

Uji T digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel independen memiliki hubungan signifikan atau tidak dengan variabel dependen

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

secara individual untuk setiap variabel. Keputusan diambil dengan cara membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} serta membandingkan nilai signifikan t dengan *level of significant* pada tingkat signifikansi (α) 0,05 atau 5%.

Variabel independen yang akan diuji yaitu partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran, terhadap variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. H_0: Tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. H_a: Terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan.

Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang.

Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

4.1.2 Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1. Sekretariat Daerah

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 464

Tugas Pokok dan Fungsi : Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Alamat : Jl. Jend. Sudirman

Tugas Pokok Dan Fungsi : Sekretariat DPRD mempunyai tugas Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3. Inspektorat

Alamat : Jl. Mustafa Sari No. 1

Tugas Pokok dan Fungsi : Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan lainnya. Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan poemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota serta pelaksanaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;

c. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan pengawasan;

d. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan.

4. Badan Pendapatan Daerah

Alamat : Jl. Teratai No. 83

Tugas Pokok dan Fungsi : BAPENDA mempunyai tugas yang bersifat teknis operasional dibidang pendapatan. Menyelenggarakan administrasi yaitu sebagai tempat atau wadah dalam pembayaran pajak daerah.

5. Badan Perpustakaan dan Kearsipan

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 1

Tugas Pokok dan Fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang perpustakaan dan kearsipan;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perpustakaan dan kearsipan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perpustakaan dan kearsipan;

d. Pelaksanaan administrasi dibidang perpustakaan dan kearsipan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.464

Tugas Pokok dan Fungsi : Melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Serta, mempunyai fungsi :

a. Penyusun kebijakan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Alamat : Jl. Jend. Sudirman

Tugas Pokok dan Fungsi : Meyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

teknis lingkup badan serta kesekretariatan BAPPEDA meliputi Umum, Kepegawaian, Keuangan, dan Perencanaan.

8. Badan Penelitian dan Pengembangan

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 1

Tugas Pokok dan Fungsi : BALITBANG diantaranya, menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan pemerintahan. Dan melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan serta melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah.

9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 464

Tugas Pokok dan Fungsi : Tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelola keuangan daerah dan pengelola aset daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
b. Pelaksanaan tugas teknis Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi;
c. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Memfasilitasi penyusunan, penetapan, perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

e. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas.

10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Alamat : Jl. Arifin Ahmad No. 39

Tugas Pokok dan Fungsi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Serta, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;

c. Pembinaan dan fasilitas bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Kota;

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Dinas Pendidikan

Alamat : Jl. Pattimura No. 40A

Tugas Pokok dan Fungsi : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan bidang pendidikan. Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendidikan;

c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pendidikan;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.

12. Dinas Kesehatan

Alamat : Jl. Melur No. 103

Tugas Pokok dan Fungsi : Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dibhidang kesehatan sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Adapun fungsi Dinas Kesehatan adalah :

a. Perencanaan program-program kesehatan dengan pendekatan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif);

b. Pembinaan manajemen kesehatan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksaaan dan pengendalian kebijakan kesehatan;

c. Pembinaan, pengawasan operasional dan pengendalian atas pengelolaan pelayanan kesehatan pada fasilitas-fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta serta fasilitas non kesehatan yang mempunyai pengaruh kepada kesehatan masyarakat;

d. Pengupayaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

e. Perencanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan Medis KB dan Gizi Masyarakat;

f. Penanggulangan masalah darurat dan berencana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alamat : Jl. Parit Indah No. 6

Tugas Pokok dan Fungsi : Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan lainnya. Serta, menyelenggarakan fungsi :

a. Peyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
b. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata ruang;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
d. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.

14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alamat : Jl. Parit Indah No. 6

Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan lainnya. Serta, menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman;

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman.

d. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan dan permukiman.

e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.

15. Dinas Sosial

Alamat : Jl. Parit Indah No. 6

Tugas Pokok dan Fungsi : Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kota dibidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

a. Melakukan pelaksanaan pembinaaan kewenangan dibidang kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Walikota;

b. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis kesejahteraan sosial di Kota;

c. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kota;

d. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien yang telah dilatih dan diberi bantuan.

16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Alamat : Jl. Teratai No.83

Tugas Pokok dan Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;

b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;

c. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;

e. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.

17. Dinas Tenaga Kerja

Alamat : Jl. Samarinda No. 29

Tugas Pokok dan Fungsi :

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang ketenagakerjaan;

b. Penyelengaraan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Pengarahan pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan;

d. Perumusan Visi dan Misi serta Rencan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota;

e. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang ketenagakerjaan.

18. Dinas Ketahanan Pangan

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No.1

Tugas Pokok dan Fungsi :

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

b. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Daerah.

19. Dinas Pertanahan

Alamat : Jl. Sumatera No. 5

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Adapun fungsinya yaitu :

a. Perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertanahan, penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pertanahan;
b. Perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kegiatan bidang pengadaan dan penataan pertanahan;
c. Perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kegiatan bidang pemetaan dan penanganan konflik;
d. Pembinaan dan pengembangan bidang pertanahan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota seusai dengan tugas dan fungsinya.

20. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Alamat : Jl. Parit Indah No. 4

Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dilingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya. Serta, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan lingkungan hidup dan kebersihan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

d. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;

e. Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

f. Pembinaan, Pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.

21. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alamat : Jl. Mustafa Sari No.1

Tugas Pokok dan Fungsi :

a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Pendaftaran Pendudukan, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

b. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendaftaran Pendudukan, Pencatatan Sipil dan Informasi Administrasi Kependudukan.

c. Membina dan melaksanakan tugas pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil;

d. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Alamat : Jl. Puyuh No.2

Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan lainnya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta inovasi pelayanan administrasi;
b. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data, serta pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
e. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
f. Pelaksanaan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

23. Dinas Perhubungan

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No.88

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tugas Pokok dan Fungsi :

a. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah;
b. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
c. Meyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi;
d. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana, dan kominfo;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

24. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Alamat : Jl. Pepaya

Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Goverment, Bidang Layanan e-Goverment, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian.

25. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Alamat : Jl. Teratai No. 83A

Tugas Pokok dan Fungsi :

a. Merumuskan kebijkan teknis dalam bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidangkoperasi, kecil, dan menengah;
c. Membina dan melaksanakan urusan bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
e. Membina unit pelaksaa teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

26. Dinas Pertanian dan Perikanan

Alamat : Jl. Ibrahmim Sattah No. 30

Tugas Pokok dan Fungsi : Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian. (Bidang Tanaman pangan dan hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Kehutanan dan Perkebunan serta Bidang Kelautan dan Perikanan). Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Pelaksana fungsi teknis operasional berupa :

   1. Merumuskan kebijaksanaan teknis/ operasional daerah di bidang Pertanian;
   2. Memberikan perizinan usaha-usaha di bidang Pertanian dan melaksanakan pemberian pelayanan umum di bidang Pertanian;
   3. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap Cabang Dinas di bidang Pertanian serta pengelolaan urusan ketatausahaan.

b. Pelaksana tugas pelayanan teknis administrasi ketatausahaan berupa : Membantu, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas serta menyusun konsep kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk 53 teknis bidang Tata Usaha Dinas diselenggarakan oleh Bagian Sekretariat.

27. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Alamat : Jl. Kuantan I No. 5

Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga dan tugas pembantuan lainnya. Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan di bidang pemuda dan olahraga;
b. Pengoordinasian, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijaksanaan dan kegiatan pengembangan kepemudaan dan olahraga;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. penyusunan rencana kerja dan program pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga;
d. Pemberian dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
e. Penetapan pedoman pemberdayaan masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga.

28. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Alamat : Jl. Arifin Ahmad No. 39

Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata. Adapun fungsi Dinas Pariwisata Kota sebagai berikut :

a. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan pemberian perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Membantu mengendalikan atas pelaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

29. Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu

Alamat : Jl. Jend. Sudirman

Tugas Pokok dan Fungsi : Tugas DPMPTSP melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota dalam bidang pelayanan perizinan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

non perizinan secara terpadu serta penanaman modal prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Adapun fungsi DPMPTSP sebagai berikut :

a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
c. Perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
d. Penerbitan dan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang yang dilimpahkan oleh Walikota;
e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas.

30. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Alamat : Jl. Cempaka No. 31

Tugas Pokok dan Fungsi : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan serta tugas pembantuan lainnya. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis tentang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis tentang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas dukungan teknis penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
d. Pembinaan teknis, penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang tentang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
e. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah.

31. Satuan Polisi Pamong Praja

Alamat : Jl. Jadirejo, Sukajadi

Tugas Pokok dan Fungsi : Menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Adapun fungsinya yaitu :

a. Penyusunan program ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakan Peraturan Daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelengaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis; pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang SATPOL PP.

4.1.3 Demografi Responden

Data yang diperoleh dari penelitian ini diambil dengan cara penyebaran kuesioner secara langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Setiap sampel masing-masing memiliki 3 responden yaitu; Kepala Sub bagian keuangan, Bendahara dan Staff bagian akuntansi yang terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru. Penyebaran kuesioner dimulai dari tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 November 2017. Berikut data jumlah penyebaran dan pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Jumlah Responden dan tingkat pengembalian

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total kuesioner yang di kirim	93	100%
Total kuesioner yang kembali	66	70,97%
Total kuesioner yang tidak kembali	27	29,03%
Total kuesioner yang tidak dapat dianalisis	-	-
Total kuesioner yang dapat dianalisis	66	70,97%

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Berikut ini data demografi sampel yang dikelempokkan atas jenis kelamin, pendidikan, lama bekerja, dapat dilihat dari tabel 4.2.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 4.2
Demografi Responden pada Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru

No	Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin		
	1. Laki-Laki	33 Orang	50%
	2. Perempuan	33 Orang	50%
	Total	66 Orang	100%
2	Latar Belakang Pendidikan		
	1. Ekonomi/ Akuntansi	45 Orang	68,18%
	2. Hukum	3 Orang	4,55%
	3. Pertanian	3 Orang	4,55%
	4. Lainnya	15 Orang	22,72%
	Total	66 Orang	100%
3	Pendidikan Terakhir		
	1. D3	4 Orang	6,06%
	2. S1	48 Orang	72,73%
	3. S2	12 Orang	18,18%
	4. Lainnya	2 Orang	3,03%
	Total	66 Orang	100%
4	Jabatan		
	1. Kabag	23 Orang	34,85%
	2. Bendahara	21 Orang	31,82%
	3. Staff Keuangan	22 Orang	33,33%
	Total	66 Orang	100%
5	Lama Bekerja		
	1. < 1 Tahun	5 Orang	7,58%
	2. 1 - 5 Tahun	13 Orang	19,70%
	3. 6-10 Tahun	26 Orang	39,39%
	4. > 10 Tahun	22 Orang	33,33%
	Total	66 Orang	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Data Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 93 eksemplar. Data yang diperoleh dari penelitian ini diambil dengan cara menyebarkan kuesioner pada 31 SKPD di Kota Pekanbaru. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 31 SKPD. Setiap sampel masing-masing

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memiliki 3 responden yaitu; Kepala sub bagian keuangan, Bendahara, dan Staf bagian akuntansi pada SKPD di Kota Pekanbaru. Penyebaran kuesioner dimulai dari tanggal 30 Oktober 2018 dan selesai pada tanggal 09 November 2017. Total kuesioner yang dibagikan adalah sebanyak 93 kuesioner, dimana pada setiap instansi/ dinas dibagikan sebanyak 3 kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 66 eksemplar. Hal ini berarti tingkat pengembaliannya adalah 70,97%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 66 orang total responden, jumlah laki-laki dan perempuan memiliki persentase yang sama yaitu sebesar 50% atau berjumlah 33 orang. Adapun latar belakang pendidikan responden, latar belakang pendidikan lainnya berjumlah 15 orang atau 22,72%, untuk latar belakang pendidikan ekonomi/ akuntansi berjumlah 45 orang atau 68,18%, sedangkan latar belakang pendidikan hukum dan pertanian memiliki jumlah yang sama yaitu; 3 orang atau 4,55%.

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa pendidikan terakhir responden setiap instansi/ dinas. Diketahui yang berpendidikan terakhir D3 berjumlah 4 orang atau sekitar 6,06%, untuk pendidikan S1 berjumlah 48 orang atau 72,73%, sedangkan pendidikan S2 berjumlah 12 orang atau 18,18%, dan pendidikan lainnya berjumlah 2 orang atau 3,03%. Untuk jabatan responden dari setiap instansi/ dinas, kepala bagian berjumlah 23 orang atau 34,85%, kemudian bendahara berjumlah 21 orang atau 31,82%, dan staff keuangan berjumlah 22 orang atau 33,33%.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa 5 responden atau 7,58% telah bekerja kurang dari 1 tahun, 13 responden atau 19,70% telah bekerja selama 1 sampai 5 tahun, adapun 26 orang atau 39,39% telah bekerja selama 6 sampai 10 tahun, dan untuk lama bekerja lebih dari 10 tahun memiliki jumlah 22 responden atau 33,33%.

4.2.2 Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil kuesioner, tabel *descriptive statistic* memperlihatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif Penelitian

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Partisipasi Anggaran	66	1.62	4.12	3.0518	.46063
Kejelasan Tujuan Anggaran	66	2.22	4.61	2.9658	.57173
Evaluasi Anggaran	66	1.73	3.91	2.7631	.50010
Kinerja Pemerintah Daerah	66	2.12	4.36	3.1189	.40828
Valid N (listwise)	66				

Sumber: Data *Output* SPSS, 2017

Pada tabel *descriptive statistic*, menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah dari 66 responden adalah sebesar 3,1189 dengan standar deviasi sebesar 0,40828. Untuk variabel Partisipasi Anggaran, nilai rata-rata yang mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dari 66 responden adalah sebesar 2,7631 dengan standar deviasi 0,50010.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk variabel Kejelesan Tujuan Anggaran, nilai rata-rata yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah dari 66 responden adalah sebesar 2,9658 dengan standar deviasi sebesar 0,57173. Sedangkan variabel Evaluasi Anggaran, nilai rata-rata yang mempengaruhi Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dari 66 responden adalah 3,0518 dengan standar deviasi 0,46063.

4.2.3 Hasil Uji Kualitas Data

Dilakukan uji kualitas data untuk menarik kesimpulan penelitian yang berupa jawaban atau pemecahan masalah penelitian yang mana dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi: pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. Kesimpulan yang didapat tergantung kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

a. Hasil Uji Validitas

Validitas data dapat ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu instrumen dikatakan mempunyai validitas yang kuat apabila instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur. Uji validitas penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah pertanyaan/ pernyataan pada kuesioner yang telah diedarkan dapat mengukur variabel yang akan diukur. Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Sig. (*2-tailed*)	Kesimpulan
Partisipasi Anggaran	0,000-0,020	Valid
Kejelasan Tujuan Anggaran	0,000	Valid
Evaluasi Anggaran	0,000-0,001	Valid
Kinerja Pemerintah Daerah	0,000-0,003	Valid

Sumber: Data *Output* SPSS, 2017

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasil pengujian validitas yang disajikan pada tabel dapat dilihat bahwa skor masing-masing butir dan skor total nilai Sig. (*2-tailed*)) < 0,05 sehingga seluruh kuesioner dinyatakan valid.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik *reliability analyze* dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien *cronbach* atau alpha sebesar <0,6 tidak reliabel; 0,6-0,7 *acceptabel*, dan >0,8 sangat baik. Hasil uji reliabilitas data dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	Jumlah Item	*Cronbach Alpha*	Kesimpulan
Partisipasi Anggaran	8	0,628	Reliabel
Kejelasan Tujuan Anggaran	4	0,619	Reliabel
Evaluasi Anggaran	7	0,664	Reliabel
Kinerja Pemerintah Daerah	11	0,609	Reliabel

Sumber: Data *Output* SPSS, 2017

Hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada tabel 4.5 menunjukkan tidak ada koefisien *cronbach alpha* yang < 0,6, sehingga instrumen tersebut reliabel untuk digunakan.

4.2.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Dengan menggunakan Normal P-P Plot data yang ditunjukkan menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berikut hasil uji normalitas pada Gambar 4.1

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

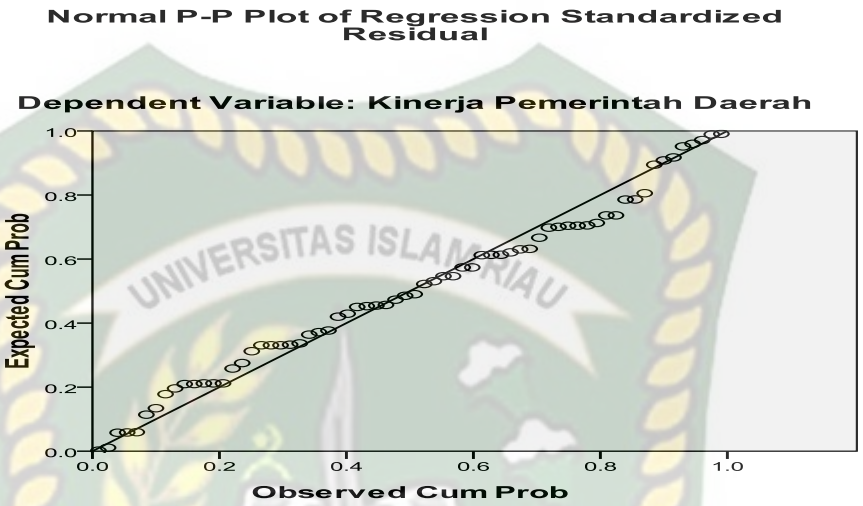

Sumber: Data *Output* SPSS, 2017

Dari gambar diatas terlihat data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Apabila nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 0,10 berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2013:106).

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	Keterangan
Partisipasi Anggaran (X1)	.866	1.155	Tidak terdapat Multikolinieritas
Kejelasan Tujuan Anggaran (X2)	.914	1.094	Tidak terdapat Multikolinieritas
Evaluasi Anggaran (X3)	.920	1.087	Tidak terdapat Multikolinieritas

Sumber: Data *Output* SPSS, 2017

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel independen < 10 dan *tolerance* > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gejala heteroskedastisitas dideteksi dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

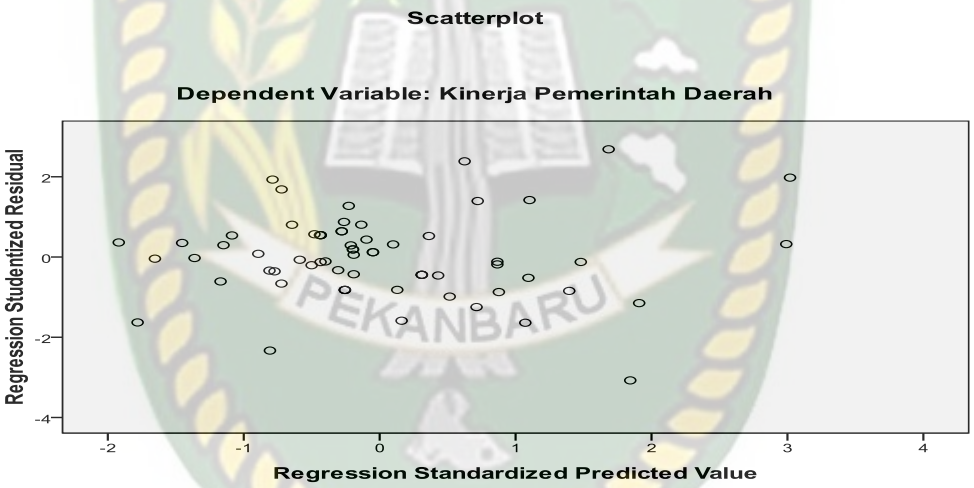

Sumber: Data *Output* SPSS, 2017

Dari gambar *scatterplot* diatas terlihat bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah alau di sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali serta penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi dideteksi dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (*DW Test*), bila nilai DW antara -2 sampai +2 berarti tidak terdapat adanya autokorelasi.

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

Durbin Watson	N	Keterangan
1,880	66	Tidak terdapat Autokorelasi

Sumber: Data *Output* SPSS, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan analisis data pada tabel diatas, diketahui angka (*Durbin Watson*) terletak antara -2 dan 2 = -2 < 1,880 < 2. Maka disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi.

4.2.5 Hasil Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda (*multiple regression*) digunakan untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kota Pekanbaru.

Tabel 4.8

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Evaluasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Partisipasi Anggaran[a]	.	Enter

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Evaluasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Partisipasi Anggaran[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

Sumber: Data *Output* SPSS, 2017

Hasilnya dapat terlihat bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model adalah Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Evaluasi Anggaran. Serta variabel dependennya adalah Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dan tidak ada variabel yang dikeluarkan (*removed*).

Hasil *output* dari pengujian menggunakan program SPSS versi 17.0:

Tabel 4.9
Koefisien Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	1.523	.403		3.780	.000			
	Partisipasi Anggaran	.277	.105	.312	2.627	.011	.401	.316	.291
	Kejelasan Tujuan Anggaran	.210	.083	.295	2.545	.013	.370	.308	.282
	Evaluasi Anggaran	.046	.094	.056	.488	.627	.109	.062	.054

Sumber: Data *Output* SPSS, 2017

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = 1{,}523 + 0{,}277\ X_1 + 0{,}210\ X_2 + 0{,}046\ X_3 + 0{,}403$$

Hasil dan pembahasan regresi di atas adalah:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Nilai kostanta (α) sebesar 1,523 artinya jika Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Evaluasi Anggaran 0 (nol) maka Kinerja Aparat Pemerintah Daerah bernilai 1,523.

b. Nilai koefisien regresi variabel Partisipasi Anggaran (X_1) bernilai 0,277 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Partisipasi Anggaran sebesar 1 maka akan terjadi peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah sebesar 0,277 dengan nilai asumsi Kejelasan Tujuan Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah bernilai konstan.

c. Nilai koefisien regresi variabel Kejelasan Tujuan Anggaran (X_2) bernilai 0,210 yang dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Kejelasan Tujuan Anggaran sebesar 1, maka akan terjadi peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah sebesar 0,210 dengan nilai asumsi Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah bernilai konstan.

d. Nilai koefisien regresi variabel Evaluasi Anggaran (X_3) bernilai 0,046 yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan Evaluasi Anggaran sebesar 1 maka akan terjadi peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah sebesar 0,046 dengan nilai asumsi Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah bernilai konstan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.10
Nilai Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.490[a]	.240	.204	.36434	1.880

a. Predictors: (Constant), Evaluasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Partisipasi Anggaran
b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber: Data Output SPSS, 2017

Pada tabel *model summary* diatas dapat dijelaskan bahwa koefisien korelasi (R) sebesar 0,490 artinya hubungan antara variabel partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah tergolong sedang.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R *square* (R^2) sebesar 0,240 atau 24%, artinya kemampuan dari variabel partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran dalam menjelaskan variabel kinerja aparat pemerintah daerah sebesar 0,240 atau 24%, sedangkan sisanya 76% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kecil.

c. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui hasil uji terhadap hipotesis, maka dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila sig. < 0,05 maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa secara simultan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Berikut tabel hasil Uji F adalah sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 4.11
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.605	3	.868	6.541	.001[a]
	Residual	8.230	62	.133		
	Total	10.835	65			

a. Predictors: (Constant), Evaluasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Partisipasi Anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber: Data *Output* SPSS, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa uji anova (*Analysis Of Variance*), Sig. (0,001) < 0,05. maka H_o ditolak dan H_a diterima. Artinya secara simultan partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

d. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui hasil uji terhadap hipotesis, maka dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila sig. < 0,05 maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap dependen. Hasil tabel Uji t adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.523	.403		3.780	.000
	Partisipasi Anggaran	.277	.105	.312	2.627	.011
	Kejelasan Tujuan Anggaran	.210	.083	.295	2.545	.013

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	Evaluasi Anggaran	.046	.094	.056	.488	.627

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber: Data *Ouput* SPSS, 2017

1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel 4.12. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Sig. (0,011) < 0,05. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, variabel partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

2. Pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua dapat dilihat pada tabel 4.12. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Sig. (0,013) < 0,05. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Artinya variabel kejelasan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

3. Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat pada tabel 4.12. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Sig. (0,627) > 0,05. Dengan demikian maka H_0 diterima dan H_3 ditolak. Artinya variabel evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

4.3 Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini membahas keterkaitan antara variabel independen yang meliputi partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Dari keterkaitan tersebut kemudian dikembangkan dengan teori-teori yang mendukung. Hasil pembahasan lebih lanjut akan diuraikan dalam poin-poin berikut ini:

4.3.1 Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Partisipasi anggaran dinilai dapat mengurangi kesenjangan anggaran apabila bawahan membantu memberikan informasi pribadi tentang prospek masa depan sehingga anggaran yang disusun menjadi lebih akurat, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa semakin besar partisipasi anggaran dari para pimpinan akan dapat meningkatkan kesenjangan anggaran. Keterlibatan kerja juga diyakini dapat mempengaruhi kesenjangan anggaran daerah di mana semakin tinggi keterlibatan kerja aparat akan semakin menimbulkan besarnya kesempatan bagi para aparat untuk menimbulkan kesenjangan anggaran.

Terlihat bahwa dalam suatu kegiatan partisipasi anggaran, pegawai dituntut untuk selalu melakukan usulan kegiatan penganggaran, sehingga dinilai memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja aparat dalam mengelola anggaran keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Kegiatan usulan SKPD perlu disosialisasikan oleh seluruh pegawai dengan memahami kebutuhan masyarakat dalam pengelolaannya, sehingga kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Pegawai untuk meningkatkan kinerjanya dituntut untuk mengembangkan program yang sesuai dengan target dan sasaran program yang dihasilkan. Hal ini untuk dapat memberikan tingkat partisipasi anggaran yang menunjang terwujudnya kinerja aparat pemerintah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Uraian di atas didukung oleh teori Munawar (2006:18) dalam menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja para aparat akan meningkat. Hal ini didasarkan bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka aparat akan menginternalisasikan tujuan dan standar yang ditetapkan dan aparat juga memiliki rasa tanggungjawab pribadi untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat Pemda, ini berarti bahwa peningkatan atas partisipasi aparat Pemda dalam pembuatan anggaran akan meningkat kinerja aparat Pemda, sebaliknya jika partisipasi aparat Pemda dalam pembuatan anggaran turun maka kinerja aparat Pemda juga akan turun. Semakin tinggi keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran tersebut akan mendorong para aparat untuk bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas yang diembanya sehingga dapat meningkatkan kinerja agar target yang telah ditetapkan akan tercapai.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu Istiyani (2009) juga menemukan bahwa partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah. Selain itu hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Munawar (2006), Nina (2014), Wardani (2015), dan Kalsum (2015). Namun hasil penelitian ini menentang penelitian terdahulu Maryanti (2010) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu penelitian Ramandei (2010) juga menyatakan partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4.3.2 Kejelasan Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Untuk dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normatif maka APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam menyusun anggaran tahunan, mekanisme dan proses penjaringan informasi pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalarn rencana strategis daerah. Namun demikian, dalam proses ini kebijakan anggaran harus dijadikan payung bagi eksekutif khususnya unit kerja dalam menyusun kebijakan anggaran tahunan. Dalam penyusunan rencana kerja masing-masing program harus sudah memuat secara lebih rinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran program output yang akan dihasilkan, sumber daya yang dibutuhkan, periode pelaksanaan program, lokasi dan indikator kinerja.

Seluruh program yang telah dirancang oleh masing-masing unit kerja,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

selanjutnya diserahkan ke Panitia Eksekutif. Panitia eksekutif menganalisis dan bila perlu menyeleksi program-program yang akan dijadikan rencana kerja di masing-masing unit kerja berdasarkan program kerja yang masuk ke Panitia Eksekutif, selanjutnya disusun dan dirancang draft Kebijakan Pembangunan Dan Kebijakan Anggaran Tahunan (APBD) yang nantinya akan dibahas dengan pihak Legislatif (Kepmendagri No 29 Tahun 2005).

Aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru dapat mengetahui hasil usahanya melalui evaluasi yang dilakukan secara efektif untuk mengetahui kejelasan tujuan anggaran yang dibuatnya dan mereka merasa puas bahwa anggaran yang dibuat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Uraian di atas didukung oleh teori Munawar (2006), kejelasan tujuan anggaran akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari aparat pemerintah daerah bahkan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran dan dengan didorong oleh komitmen yang tinggi, akan menimbulkan kinerja aparat pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Istiyani (2009), Wardani (2015), dan Kalsum (2015) yang menemukan bahwa kejalasan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini menentang hasil penelitian terdahulu Nurhalimah (2013), Jumaiyah (2013), dan Nina (2014) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh kejelasan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4.3.3 Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Evaluasi anggaran dapat menunjukan selisih anggaran yang disusun dan pada kenyataanya, dengan evaluasi anggaran dapat diketahui apakah kinerja aparat tersebut dalam menyusun anggaran sudah baik atau belum. Sehingga evaluasi anggaran dapat digunakan untuk evaluasi kinerja. Karena evaluasi anggaran dapat digunakan untuk evaluasi kinerja diharapkan secara langsung evaluasi anggaran dapat mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah.

Pentingnya aspek evaluasi anggaran diterapkan dalam rangka untuk melakukan prespektif yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan tindak lanjut dari penggunaan anggaran yang dikelola oleh aparat pemerintah. Hasil evaluasi juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang perimbangan anggaran, alokasi anggaran dan berbagai pengawasan subsidi anggaran yang diperuntukkan kepada pemerintah.

Mengevaluasi dari setiap kegiatan penganggaran mempunyai efek positif terhadap kemampuan aparat dalam menilai, memanfaatkan dan mengelola anggaran yang diterapkan secara terencana, terarah dan tersusun sesuai dengan kinerja aparat dalam pengelolaan yang tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga anggaran tidak ada yang terlambat cair dan mudah dimanfaatkan dan digunakan untuk kegiatan pembangunan. Apabila evaluasi dilakukan secara terencana dengan pengawasan yang terukur, akan berdampak terhadap kinerja aparat dalam pengelolaan anggaran.

Pembahasan di atas mendukung teori yang dikemukakan oleh Munawar (2006:128) menjelaskan bahwa evaluasi secara mendasar mempunyai empat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tujuan yaitu: 1) meyakinkan bahwa kinerja yang sesungguhnya sesuai dengan kinerja yang diharapkan, 2) memudahkan untuk membandingkan antara kinerja individu satu dengan yang lainnya, 3) sistem evaluasi kinerja dapat memicu suatu isyarat tanda bahasa, memberi sinyal mengenai masalah-masalah yang mungkin terjadi, dan 4) untuk menilai pembuatan keputusan manajemen.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Istiyani (2009), Maryanti (2010), Ramandei (2010), dan Wardani (2015) yang menunjukkan bahwa evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa evaluasi anggaran yang dilakukan pada pemerintah daerah Kota Pekanbaru belum efektif dalam arti evaluasi anggaran tidak dapat mengungkap sejauh mana pertanggungjawaban aparat dalam melaksanakan tugasnya sehingga evaluasi anggaran tidak dapat mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru. Namun hasil penelitian ini menentang penelitian dari Munawar (2006), Jalaluddin (2009), Fitriani (2013), Nina (2014), dan Kalsum (2015) yang menyatakan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara simultan partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru.
2. Hasil uji hipotesis pertama membuktikan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru.
3. Hasil uji hipotesis kedua membuktikan bahwa kejelasan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru.
4. Hasil uji hipotesis ketiga membuktikan bahwa evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kota Pekanbaru.
5. Bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel kinerja pemerintah daerah sebesar 24%. Sedangkan sisanya 76% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis hendak memberikan beberapa saran untuk pemerintah Kota Pekanbaru dan juga untuk penelitian yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

akan datang, agar penelitian ini selanjutnya lebih sempurna. Saran-saran yang penulis berikan antara lain:

1. Bagi instansi yang dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru perlu meningkatkan pemahaman akan pentingnya partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan tujuan anggaran yang hendak dicapai, dan melakukan evaluasi terhadap anggaran sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. Dengan demikian akan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kota Pekanbaru.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian seperti tidak hanya aparat pemerintah daerah yang ada di Kota Pekanbaru. Namun, diperluas hingga aparat pemerintah daerah Provinsi Riau atau daerah lainnya.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan evaluasi anggaran. Oleh karena itu, diharapkan pada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabel kinerja pemerintah daerah.
4. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi akademisi yang ingin mempelajari dan memahami tentang hal-hal yang mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. (2006), *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.

Creswell, J.W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fitriani, Devi. 2013. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Ghozali, Imam. (2005). *Analisis Multilavare dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hansen, Don R dan Maryanne M. Mowen, (2000). *Akuntansi Manajemen*. Erlangga, Jakarta.

Istiyani, (2009). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Tumanggung. Tesis. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Jalaluddin dan Dafi Bahri. (2009). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Evaluasi Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh). Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Volume 2, No. 1, hal. 44-53.

Jumaiyah. (2013). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Kalsum, Astari. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Latif, Abdul. (2014). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Maryanti. (2010). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Mulyadi, (2001). *Sistem Akuntansi*. Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Munawar, (2006). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang. *(Tesis)*.

Nina, Gian. (2014). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Dan Keadilan Prosedural Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Skripsi Fakultas EkonomiUniversitas Negeri Padang.

Nordiawan, Dedy. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Nor, Wahyudin. (2007). Desentralisasi Dan Gaya Kepemimpina Sebagai Variabel Moderating Dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial, *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar*.

Nurhalimah, Darwanis, dan Syukriy Abdullah. (2013). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Pemerintahan Aceh. Jurnal Akuntansi. ISSN 2302-0164 pp. 27-36.

Prawirosentono, (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Bumi Aksara.

Rahayu, Sri. (2007). Study Fenemologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Diprovinsi Jambi, *Simposium Nasional Akuntansi XI Unhas Makasar*.

Ramandei, Pilipus. (2010). Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, dan Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah. Jurnal Maksi. Volume 10:55-73.

Risky, Salbiah. (2012). Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparata Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. JurnalUniversitas Sumatra Utara.

Rohman, Abdul. (2009). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Terhadap Fungi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Daerah. Jurnal Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sartono, Yulianus dan Heni Kurniawan. (2014). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

Sekaran, Uma. (2011). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi 4 Buku 1. Jakarta: : Salemba Empat.

Sekaran, Uma. (2013). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi 4 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Sumodiningrat, Gunawan. (2001). *Ekonomika Pengantar*. Yogyakarta: BPFE.

Sunyoto, Danang. (2009). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Media Pressindo.

Wardani A,S., dan Dwi Sudaryati. (2015). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

_____, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jakarta*.

_____, Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Jakarta.

_____, Permendagri No. 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, *Jakarta*.

Ansam, Hermanto. 2017. "Fitra Nilai, Rasionalisasi Anggaran di Pemko Pekanbaru, Hanya Basabasi Anggaran Angkut Sampah." Goriau.com.http://berita/baca/fitra-nilai-rasionalisasi-anggaran-di-pemko-pekanbaru-hanya-basabasi-anggaran-angkut-sampah-rp512-miliar.html. Diakses tanggal 05 oktober 2017.

Pekanbaru. Situs Resmi Pemerintahan Kota Pekanbaru. Melalui (http://pekanbaru.go.id). Diakses tanggal [27/10/2020].

Riau. Situs Resmi Pemerintahan Provinsi Riau. Melalui (http://riau.go.id). Diakses tanggal [05/10/2017].

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :